BAB III

PROFIL PERUSAHAAN

3.1.Tinjauan Umum Perusahaan

1.1.1 Sejarah umum PT POS INDONESIA

Perposan "Modern" di Indonesia dimulai sejak 1602 di jaman V.O.C (*Verenigde Oost Indische Compagnie*). Perhubungan pos pada waktu itu dilakukan terbatas diantara kota-kota tertentu di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa dengan menggunakan alat angkut kereta kuda dan kapal layar pacalang. Pada waktu itu suratpos ditempatkan pada Stadsherbrg (Gedung Penginapan Kota) dan belum dilakukan pengantaran surat pos, sehingga tiap orang dapat memeriksa apakah ada surat pos baginya. Sebuah kantor pos pertama kali didirikan di jakarta pada tahun 1746 oleh Gubernur Jenderal G.W.Baron Van Imhoff dengan tujuan untuk lebih menjamin keamanan surat pos. Beberapa tahun kemudian didirikan Kantor Pos di kota-kota lainnya.

Pada 1809 dibangun jalan Raya Pos (Groote Postweg) oleh Gubernur Jenderal Daendels yang membentang sepanjang 1000 km dari anyer ke panarukan. Pembangunan jalan raya pos membawa perubahan luar biasa dalam perhubungan pos. Waktu tempuh dari Jawa Barat ke Jawa Timur yang sebelumnya memakan waktu 40 hari dapat diperpendek menjadi 6 hari. Hingga saat ini perjalanan pos Indonesia memang sudah berlangsung selama empat abad, tetapi sejarah pos indonesia dimulai pada 27 September 1945, ketika sekelompok angkatan muda PTT merebut gedung pusat PTT di Bandung dari kekuasaan Jepang. Fase ini merupakan tonggak dimulainya pengelolaan dan pelayanan pos oleh bangsa Indonesia. Peristiwa 27 September 1945 lebih dikenal sebagai "Hari Bhakti Postel". Pos Indonesia adalah BUMN yang menyediakan

layanan komunikasi, keuangan, dan logistik di Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang No. 6 tahun 1984 tentang Pos dan Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1985 tentang Penyelenggaraan Pos menugaskan kepada PT Pos Indonesia (Persero) untuk melaksanakan Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Pos.

1.1.2 Dasar Hukum PT POS INDONESIA

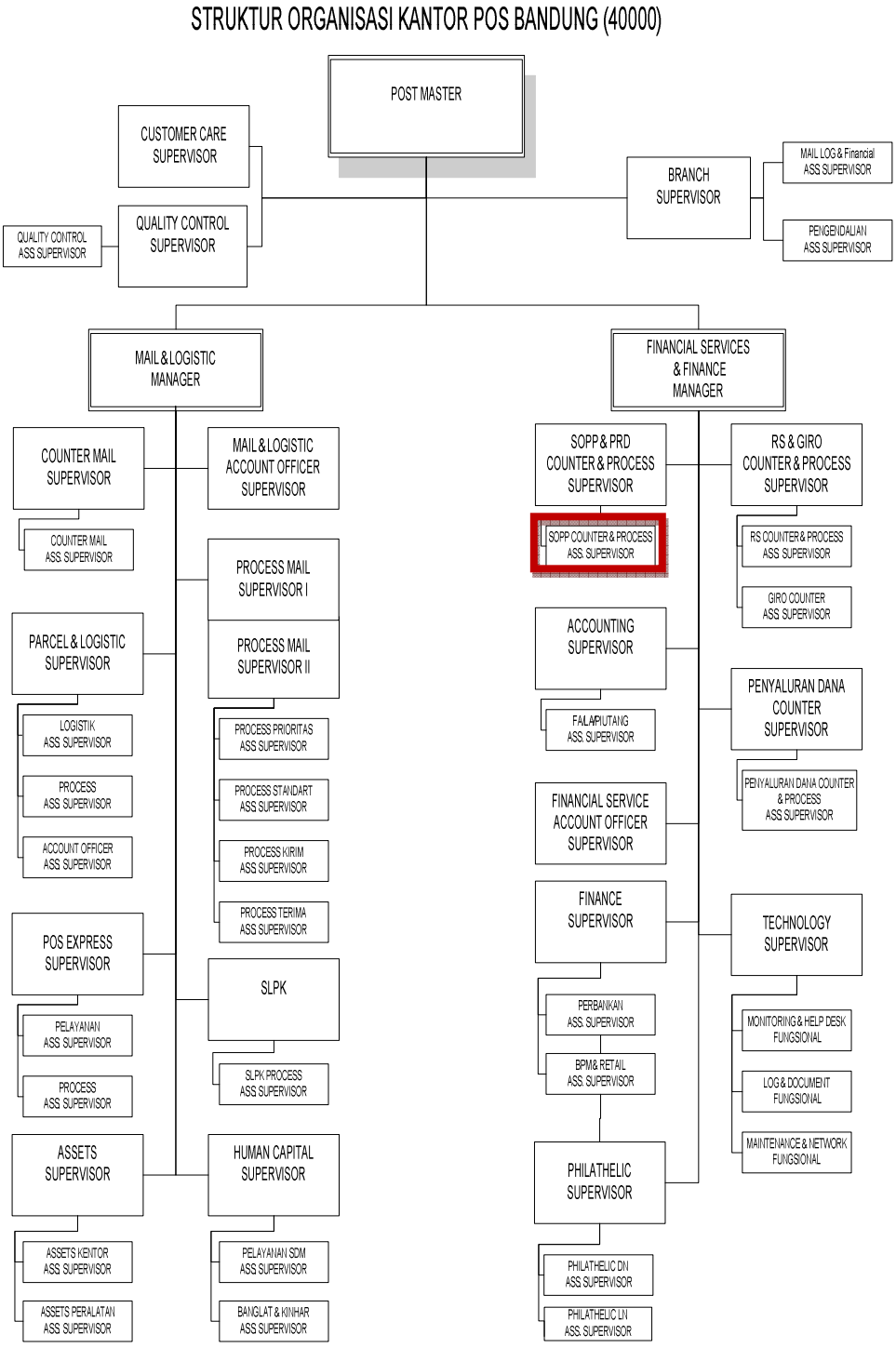
Undang – undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perusahaan Perseroan :

Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 1995 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum(PERUM) Pos dan Giro menjadi Perusahaan (PERSERO).

(Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 11);

Anggaran Dasar PT Pos Indonesia (PERSERO) yang tercantum dalam akta Notaris Sutjipto, SH Nomor117 tanggal 20 Juni 1995 tentang Pendirian Perusahaan Persero PT Pos Indonesia sebagaimana telah diubah dengan akta Notaris Sutjipto, SH Nomor 89 tanggal 21 September 1988 dan Nomor 111 tanggal 28 Oktober 1998.

3.2. Struktur Organisasi Perusahaan



Gambar 3.1
Struktur Organisasi PT POS

3.3. Deskripsi Kerja

Sebagaimana diketahui dan secara rinci penguraian tugas pada bagian Supervisor dan PRD SOPP Kantor Pos Bandung 40000 sebagai berikut :

SOPP & PRD COUNTER SUPERVISOR

a. Menerima Neraca Loket, SOPP-1 beserta SLIP / KUITANSI lembar ke-2 dari petugas.
b. Lakukan balancing proses yaitu membandingkan/ mencocokkan antara SOPP-1 dengan SLIP / KUITANSI lembar ke-2, Neraca Loket serta buku setoran ke kasir. Jika cocok tanda tangani naskah-naskah tersebut.
c. Membuat / cetak SOPP-2a dan SOPP-2b, yang merupakan rekapitulasi tagihan rekening Pihak Ketiga dari masing-masing petugas.
d. Mencocokkan/membandingkan data pada SOPP-1 dengan SOPP-2a dan SOPP-2b.
e. SOPP-2a dan SOPP-2b dibuat dalam rangkap 2, untuk selanjutnya setelah dilakukan pencocokan dan ditandatangani akan didistribusikan sebagai berikut :
    1. Lembar 1 kepada Manajer Akuntansi
    2. Lembar 2 + SLIP + SOPP-1 sebagai pertinggal.